

EVALUASI TA2022 DAN RENCANA KERJA TA2023

Jakarta, 16 Januari 2023



Atqo Mardiyanto
Sekretaris Utama

"Mencatat Pertanian Indonesia
Untuk Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani"





66

TERIMA KASIH DAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA

ATAS KERJA KERAS DAN KOMITMEN
SELURUH PEGAWAI DALAM
MENYUKSESKAN PENDATAAN AWAL
REGSOSEK, PERSIAPAN ST2023, DAN
KEGIATAN RUTIN BPS LAINNYA





Percepatan Perubahan UU Statistik disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023



Penyelenggaraan Layanan Manajemen Data Statistik (sesuai Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional)

Dalam bentuk **Sistem Infrastruktur Statistik Nasional** yang berbagi pakai dalam rangka mendukung:

- ▶ *Big Data* pemerintah
- ▶ Satu Data Indonesia (SDI)
- ▶ Sistem Statistik Nasional (SSN)



Kegiatan besar tahun 2023

- Pasca-Lapangan Pendataan Awal Regsosek
- Pelaksanaan Lapangan ST2023
- Diseminasi Hasil SP2020 LF
- Pembentukan Diagram Timbang Hasil SBH 2022
- Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB
- Perubahan UU Statistik
- ... dan kegiatan rutin lainnya



*Pelajari apa yang kita kerjakan,
Kerjakan apa yang kita pelajari*



Kematangan proses bisnis kegiatan



Kualitas dan rentang kendali petugas



Publisitas dan komunikasi publik



Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*



Penjaminan kualitas data



Pengelolaan administrasi

PASCA PENDATAAN LAPANGAN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)



Mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



2022: Pendataan Lapangan



Kendala saat pendataan

- ▶ Response rate: penolakan untuk diwawancara petugas
- ▶ Cakupan pendataan:
 - Kawasan yang sulit diakses
 - Wilayah terkena bencana

2023: Forum Konsultasi Publik (FKP)

Pembahasan hasil pendataan dengan seluruh unsur di wilayah setempat untuk menyepakati pemeringkatan kesejahteraan keluarga



Peserta:

- Kepala Desa/Lurah atau Aparat Desa/Kelurahan (sebagai Fasilitator)
- Asisten Fasilitator (pegawai BPS)
- Tokoh masyarakat dan agama
- Babinsa/Bhabinkamtibmas
- Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS)



Telah dilakukan Permohon Dukungan kepada Kemendagri untuk Instruksi kepada Pemerintah Daerah dalam mengawal pelaksanaan FKP pada bulan Mei 2023

SATU PUSAT RUJUKAN DATA SOSIAL EKONOMI: PLATFORM REGSOSEK



Membangun **Sistem Infrastruktur Statistik Nasional** dalam mendukung SPBE (amanat Perpres 132/2022)

Insight untuk decision-maker

Berfokus kepada pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Inpres 4/2022

BADAN PUSAT STATISTIK



PLATFORM DIGITAL
DATA KEMISKINAN

ST2023 SENSUS PERTANIAN

- ▶ **Rekomendasi FAO:** melakukan Sensus Pertanian minimal setiap 10 tahun sekali
- ▶ **Amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik:** Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran 3

Tujuan besar yang ingin dicapai:

 **Gambaran komprehensif kondisi pertanian**
Indonesia hingga wilayah terkecil

 Perbaikan tata kelola data pertanian Indonesia menuju **Satu Data Pertanian Indonesia**

 **Mendukung kebijakan-kebijakan strategis sektor pertanian** (seperti penyaluran subsidi pupuk, konversi lahan, kedaulatan pangan, dll.)



2023: Pelaksanaan Lapangan

Rekrutmen petugas
(integrasи dengan FKP Regsosek) Februari - Maret

Pelatihan petugas Mg.4 - Mg.5 Mei

Pendataan lapangan 1 Juni - 31 Juli

Diseminasi angka sementara Desember



Telah dilakukan Permohonan Dukungan kepada Kemendagri untuk memberikan Instruksi kepada Pemerintah Daerah dalam mengawal pelaksanaan lapangan ST2023 pada **bulan Juni s.d. Juli 2023**



SBH2022
SURVEI BIAYA HIDUP

**Menangkap perubahan
pola konsumsi masyarakat**

(terakhir dilaksanakan tahun 2018)



Dasar penghitungan inflasi



Memperbarui **paket komoditas** yang dikonsumsi masyarakat



Memperbarui komposisi nilai konsumsi pada masing-masing komoditas (**diagram timbang**)



Menangkap pola konsumsi secara keseluruhan pada wilayah **perkotaan dan perdesaan**



90 kota inflasi existing
pola konsumsi di perkotaan



60 kabupaten tambahan
pola konsumsi di perdesaan



**Memungkinkan penghitungan inflasi
pada tingkat provinsi**



Bahan diskusi:
**Perluasan penghitungan inflasi
seluruh kabupaten/kota?**

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT KESESTAMAAN



.....

Outline

- 1) Evaluasi Anggaran dan Kinerja TA2022**
- 2) Rencana Kerja TA2023**
- 3) Kebijakan Tata Kerja dan SDM**
- 4) Kebijakan Dan Informasi Lainnya**

.....

EVALUASI ANGGARAN DAN KINERJA TA2022



.....

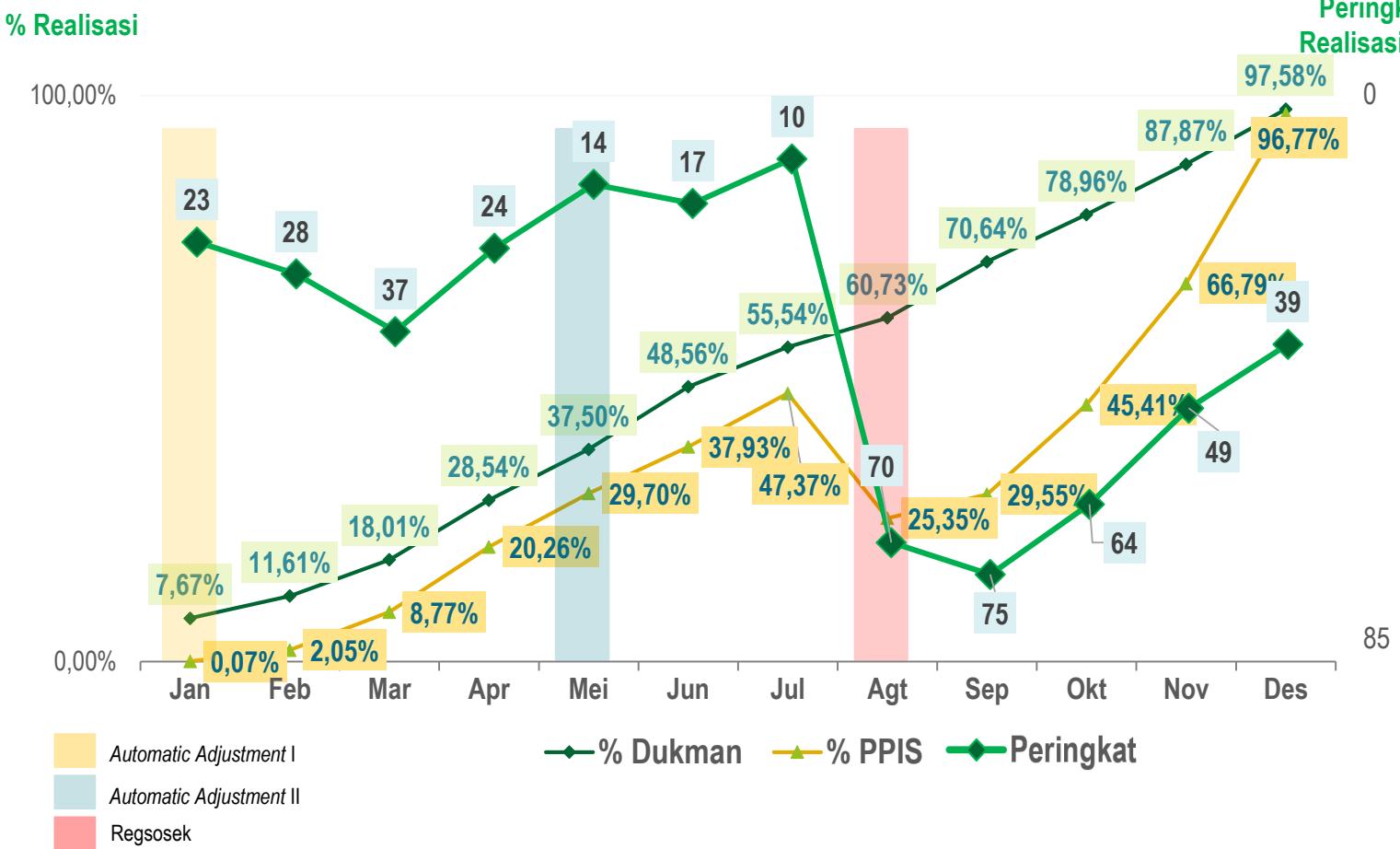
REALISASI ANGGARAN 2022: MENURUT PROGRAM DAN PERINGKAT K/L

Total Anggaran: Rp 8 560,89 M

DUKMAN: Rp 3 049,50 M

PPIS: Rp 5 511,39 M

Percentase Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Peringkat Realisasi TA2022



Percentase Realisasi

TOTAL
Rp 8 309,33 M **97,06 %**

DUKMAN
Rp 2 975,73 M **97,58 %**

PPIS
Rp 5 333,60 M **96,77 %**

Peringkat Realisasi K/L
39 dari 85

REALISASI ANGGARAN 2022: MENURUT PROVINSI DAN SATKER

5 PROVINSI TERTINGGI

No.	Satuan Kerja	Realisasi (%)
1	SULAWESI BARAT	99,28
2	SULAWESI TENGGARA	99,23
3	NUSA TENGGARA BARAT	98,91
4	KALIMANTAN SELATAN	98,76
5	KALIMANTAN TENGAH	98,51

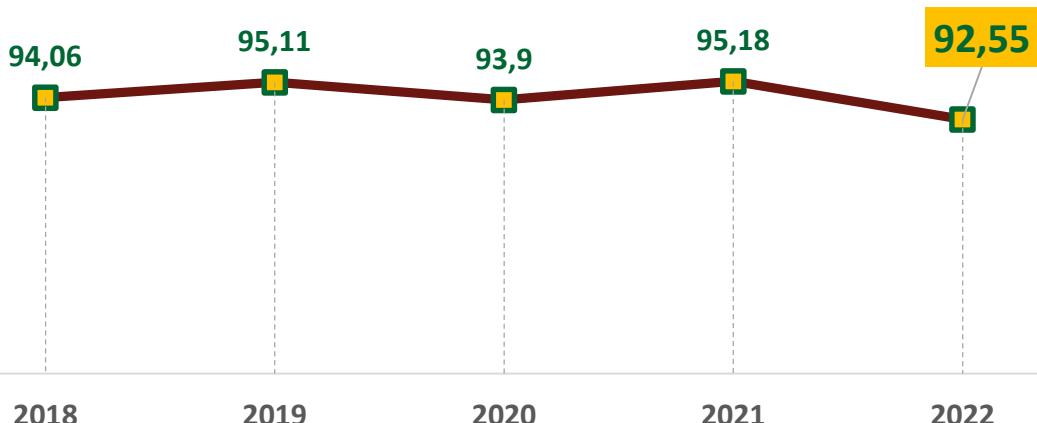
5 SATUAN KERJA TERTINGGI

No.	Satuan Kerja	Realisasi (%)
1	BPS KAB. BOMBANA	99,99
2	BPS KAB. KONAPE	99,98
3	BPS KAB. PULAU MOROTAI	99,93
4	BPS KAB. KOLAKA TIMUR	99,89
5	BPS KAB. MAMUJU UTARA	99,84



Apresiasi bagi Satker yang memiliki realisasi anggaran yang tinggi
Namun tetap perlu “kehati-hatian” dan menyelesaikan administrasi dengan baik

Series IKPA Tahun 2018-2022



*Data IKPA per 11 Januari 2023



Untuk menjadi perhatian bersama
agar dapat mengoptimalkan nilai
IKPA sampai Februari 2023



Pertahankan dan tingkatkan hasil
yang diperoleh

*“Untuk memperoleh nilai IKPA optimal, seluruh satuan kerja agar
lebih akeleratif dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran.”*



RENCANA KERJA TA2023

• • • •



Rp 8 018,90 Miliar

Total Pagu Alokasi
BPS TA2023

Dukungan
Manajemen

Rp 3 247,52 Miliar

Penyediaan dan
Pelayanan Informasi
Statistik (PPIS)

Rp 4 771,39 Miliar

Kegiatan Rutin
(baseline)

Rp 1 018,89 M

ST2023
SENSUS PERTANIAN

Rp 2 880,23 M

 REGSOSEK
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

Rp 872,27 M



Automatic Adjustment BPS TA2023 sebesar Rp599,26 Miliar

Langkah yang dilakukan BPS

Automatic Adjustment pada belanja pegawai

- ▶ Automatic Adjustment tunjangan kinerja 13 dan 14.



Pembatalan Survei

- ▶ **Prioritas Nasional:**
 - Metropolitan Statistical Area (MSA);
 - Survei Ekonomi Pertanian pada ST2023;
- ▶ **Non Prioritas Nasional:**
 - Survei Potensi Desa (Podes);
 - Survei Indeks Demokrasi Indonesia;

Efisiensi

- ▶ Efisiensi pengolahan Pendataan Awal Regsossek
- ▶ Efisiensi terhadap paket meeting, perjalanan dinas, ATK dan komputer supplies, honor narasumber, pokja, pencetakan publikasi, modal, dan anggaran lainnya.



Pelaksanaan FKP

- ✓ maksimal 12 SLS dalam 1 FKP
- ✓ dalam rentang tanggal **2 s.d. 21 Mei 2023**

Peserta

- ✓ **Fasilitator : Kades/Lurah** atau Aparat Desa/Kelurahan
- ✓ **Asisten Fasilitator : Organik BPS** (Beban fasilitator ±15 lokasi FKP)
- ✓ Ketua SLS atau perwakilan
- ✓ Tokoh Masyarakat; Tokoh Agama; Ketua/Pengurus Lembaga Desa; Babinsa; Bhabinkamtibmas

Penyesuaian pelaksanaan ST2023



Waktu pelaksanaan pencacahan lengkap menjadi **dua bulan**
(Juni s.d. Juli)



Petugas ST2023 **berkurang 50%**



ST2023 Lanjutan (SEP) **ditunda**
ke tahun 2024



1. Selama pelaksanaan FKP Regsosek dan pencacahan lapangan ST2023, kegiatan survei lainnya **ditunda** pelaksanaannya
2. Satker BPS Prov/Kab/Kota **tidak diperkenankan melaksanakan revisi anggaran** yang terkait Regsosek dan ST2023

Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN

PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu **diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN** yang dibina oleh Kementerian Keuangan.

Setiap satker agar **memberdayakan** pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN

Kebijakan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

- ✓ KPA agar memastikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2023 **telah diumumkan**.
 - **163 Satker** telah mengumumkan keseluruhan
 - **187 Satker** telah mengumumkan sebagian
 - **167 Satker** belum mengumumkan
- ✓ Perpanjangan sampai akhir Februari 2023
- ✓ Pengadaan harus **mengoptimalkan proses pengadaan tahun 2023 secara elektronik**



Menjadi pedoman bersama. Bagi satker yang tidak mengikuti arahan akan diberi sanksi.

KEBIJAKAN TATA KERJA DAN SDM



.....

16.840
Pegawai
BPS



✓ 1.045 Struktural

✓ 9.585 Fungsional

✓ 3.826 Pelaksana

⚠ 2.394 Penugasan
Fungsional

- 1.705 Penugasan Statistisi dan Prakom
- 689 Penugasan selain Statistisi dan Prakom

*Penugasan masih dapat
diberikan dengan ketentuan:*



- ✓ Sebagai persyaratan diangkat dalam jabatan fungsional sesuai penugasan (tersedia formasi)
- ✓ Kelas Jabatan satu tingkat lebih rendah kecuali *jenjang jabatan fungsional penugasan merupakan jenjang jabatan paling rendah*
- ✓ Penugasan Statistisi atau Pranata Komputer berlaku sampai tanggal **30 Juni 2023**
- ✓ Penugasan selain Statistisi dan Pranata Komputer berlaku sampai tanggal **31 Desember 2023** dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali

Setiap JPT Pratama melakukan pembinaan kepada para pegawai yang diberi penugasan agar yang bersangkutan dapat diangkat secara definitif dalam jabatan fungsional yang akan diduduki.

Organisasi yang berkinerja

- ▶ Setiap unit kerja jelas kinerjanya, menjawab tujuan organisasi, menjawab isu strategis
- ▶ Setiap pegawai jelas kontribusinya, jelas mengerjakan apa
- ▶ Evaluasi kinerja dari unit kerja dan pegawai tidak hanya sekedar “administratif”



Tata kerja yang adaptif & kolaboratif

- ▶ **Budaya kerja secara tim:**
 - Tim kerja harus dilegalkan
 - Pembentukan tim dilakukan secara standar: urusan wajib dan pilihan
 - Mengubah *mindset*: fokus kepada tujuan bersama, bukan mempersulit
- ▶ **Flexible working arrangement:**
fleksibilitas waktu dan tempat

SDM yang profesional

Meritokrasi predikat ‘Sangat Baik’: peluang pengembangan **Manajemen Talenta**

Menempatkan para pegawai yang kompeten untuk tampil di depan

- ▶ Asesmen dan *profiling*
- ▶ Pengembangan kompetensi
- ▶ Promosi dan retensi

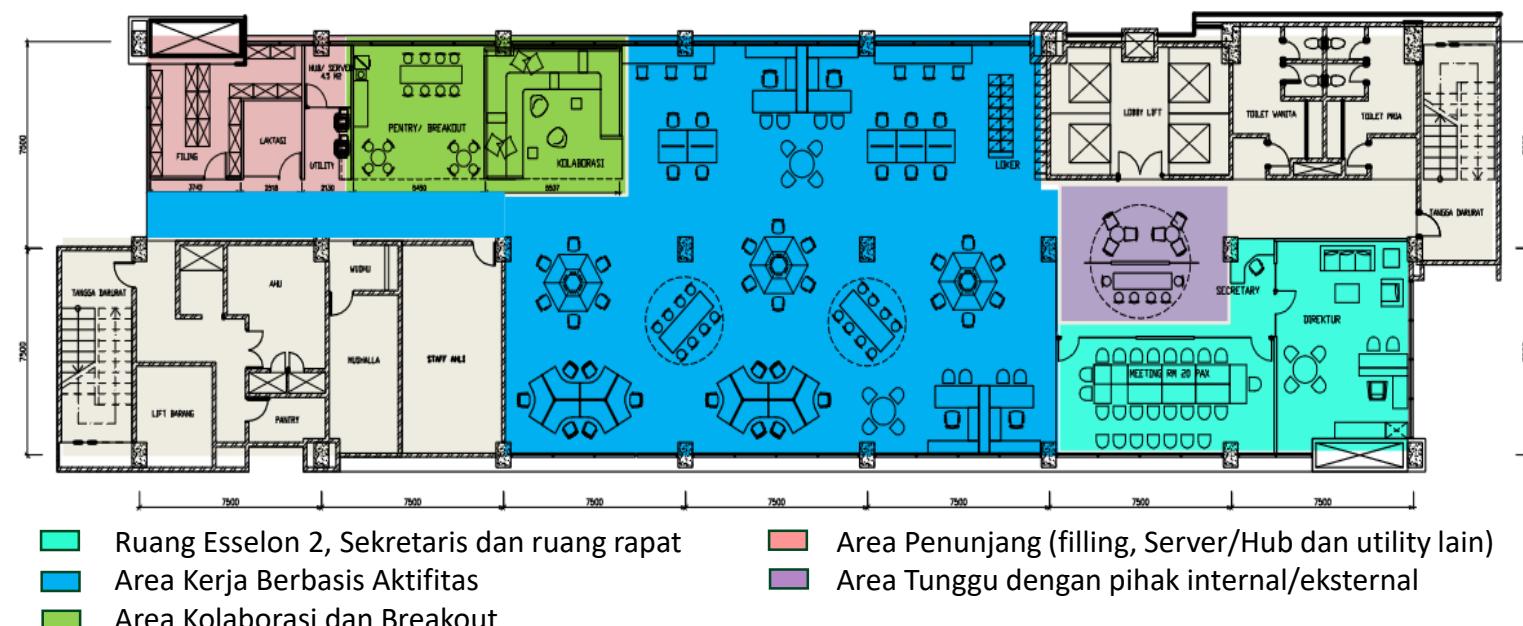
Telah disampaikan kepada seluruh JPT Pertama untuk meneruskan sekaligus menerapkan di unit kerja masing-masing



Sedang disusun rencana pelaksanaan FWA dengan penyesuaian tempat kerja

- ✓ Menciptakan ruang kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan/aktifitas;
- ✓ Setiap pegawai tidak mendapatkan alokasi *workstation/meja kerja* secara khusus (*Non-Dedicated Desk*);
- ✓ Perlu dukungan Teknologi informasi, *mobile remote working* dan budaya kerja *clean desk*; dan
- ✓ Untuk kenyamanan kerja maka kapasitas area/ruang kerja akan dibatasi misal dengan maksimal hanya 80% pegawai yang bekerja di kantor.

Contoh penyesuaian tempat kerja Biro Perencanaan sebagai *prototype FWA* tahun 2023 di Satker Pusat



Seluruh Insan BPS agar mendukung kebijakan penyesuaian tempat kerja demi menunjang fleksibilitas kerja kedepannya. Kajian FWA untuk satker Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh KBPS Provinsi.

KEBIJAKAN DAN INFORMASI LAINNYA



SIPECUT

SiPeCut

Jenis & Persyaratan Cuti

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
2. Cuti 1/2 (setengah) hari adalah cuti tahunan yang digunakan pada jam: 07.30 - 12.00 (Senin-Jumat); 13.00 - 16.00 (Senin-Kamis); 13.00 - 16.30 (Jumat).
3. Tim Pengujian Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang

4. Atasan Langsung adalah pejabat di lingkungan BPS yang mempunyai Pegawai yang berhak mendapatkan cuti dan memiliki kewenangan langsung dalam hal memberikan pertimbangan cuti.
5. Pejabat yang berwenang memberikan Cuti yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang.

Link Feedback Aplikasi: <http://sipecut.bps.go.id/feedback>

Mendukung penyelenggaran pengajuan cuti pegawai

Aktif berjalan per 1 Februari 2023

KIPAPP

KiPApp

Selamat Datang di KiPApp

KiPApp merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja ASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Seusi Permenpan RB 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja ASN. Pengelolaan Kinerja Pegawai terdiri dari:

- Penerapan Kinerja pegawai melalui penetapan dan identifikasi Kinerja;
- Pelaksanaan, pemantauan dan pemimpinan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkeseriusan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
- Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan

Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Aplikasi KiPApp membantu dalam penerapan kinerja pegawai dengan tujuan dan sasaran instansi serta memberikan informasi kinerja dan level ketepian kinerja pegawai di Lingkungan BPS.

Pemanfaatan KiPApp (disebut *keep app*) juga memiliki fungsionalitas agar setiap pegawai senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran instansi.

© 2022. Mede with by Direktorat Sistem Informasi Statistik. (Versi 0.9.5)

Mendukung penyelenggaraan pengelolaan kinerja pegawai (Permenpan-RB 6/2022) serta Menjawab Cascading Kinerja

Aktif berjalan dimulai SKP 2022

SRIKANDI



SRIKANDI

Beranda - Selamat datang, Tri Purwanto, SST, SE, M.Si!

Tandatangan Naskah

Naskah yang belum ditandatangani 0

Naskah yang belum ditandatangani 0

Naskah yang ditandatangani 0

Naskah yang ditandatangani 0

Naskah Keluar

Naskah yang belum dikirim 0

Naskah yang belum dikirim 0

Naskah yang dikirim 0

Naskah yang dikirim 0

Verifikasi Naskah

Naskah yang belum diverifikasi 0

Naskah yang belum diverifikasi 0

Naskah yang diverifikasi 0

Naskah yang diverifikasi 0

Naskah Masuk

Naskah yang belum dibaca 0

Naskah yang belum dibaca 0

Naskah yang dibaca 0

Naskah yang dibaca 0

Naskah Disposisi

Naskah yang belum ditindaklanjuti 0

Naskah yang belum ditindaklanjuti 0

Naskah yang ditindaklanjuti 0

Naskah yang ditindaklanjuti 0

Naskah Tembusan

Naskah yang belum dibaca 0

Naskah yang belum dibaca 0

Naskah yang dibaca 0

Naskah yang dibaca 0

Berita

Log Disposisi

Daftar Disposisi

Log Tembusan

Daftar Tembusan

Pengaturan

Berita

Mendukung penyelenggaraan Administrasi naskah dinas

Pelaksanaan uji coba di Satker Pusat

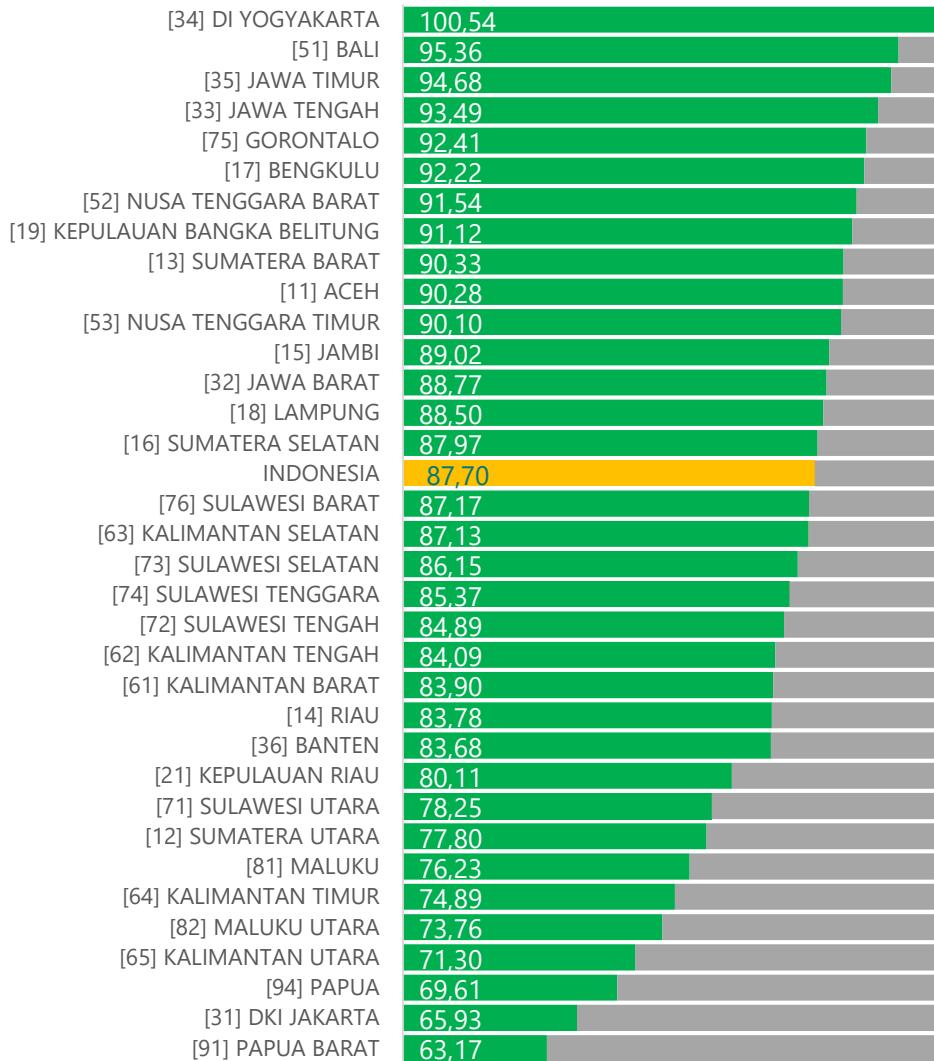


KEBIJAKAN DAN INFORMASI TERKAIT REGSOSEK



CAPAIAN PENDATAAN AWAL REGSOSEK

PERSENTASE KELUARGA VK REGSOSEK TERHADAP ADMINDUK



Hasil Rekap VK Regsosek Per 26 Desember 2022

77,993,805

Jumlah keluarga VK telah dientri

87,70%

dari jumlah keluarga versi adminduk
88,929,048

CAPAIAN PENDATAAN AWAL REGSOSEK

PERSENTASE KELUARGA VK REGSOSEK TERHADAP ADMINDUK

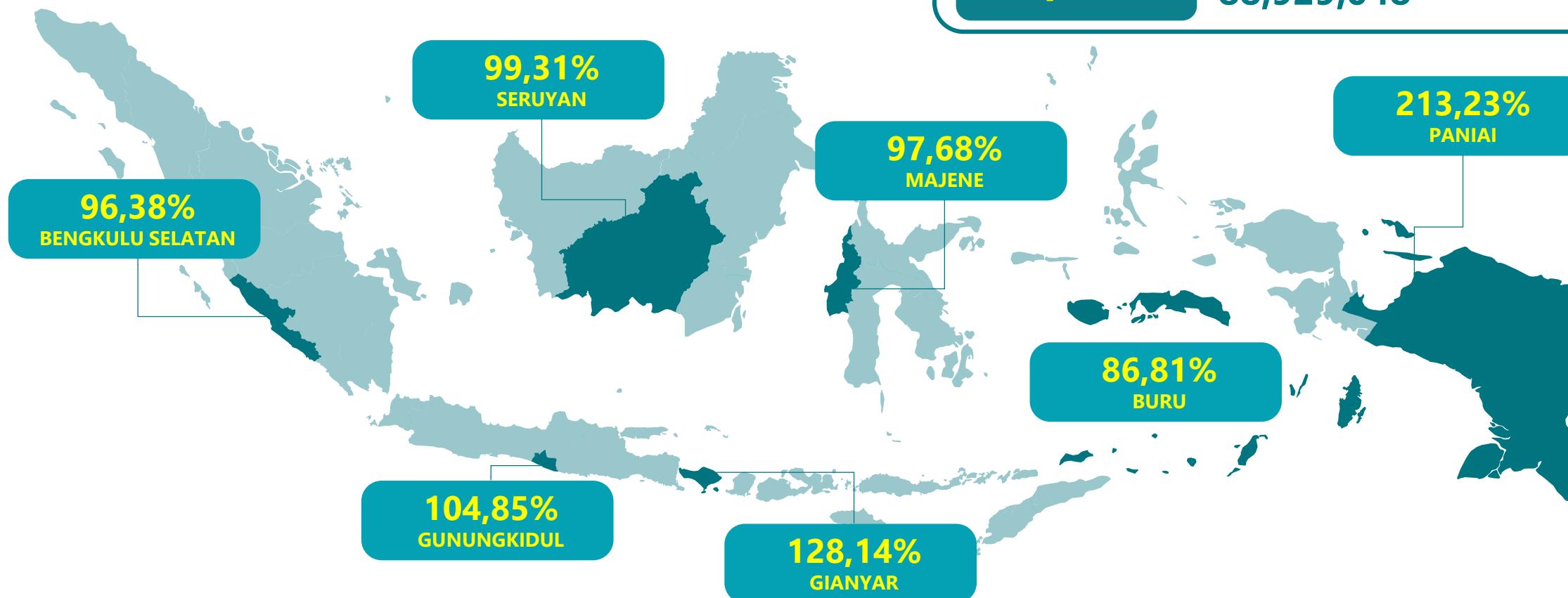
PERSENTASE CAPAIAN KAB/KOTA TERTINGGI PERWAKILAN PULAU

77,993,805

Jumlah keluarga VK telah dientri

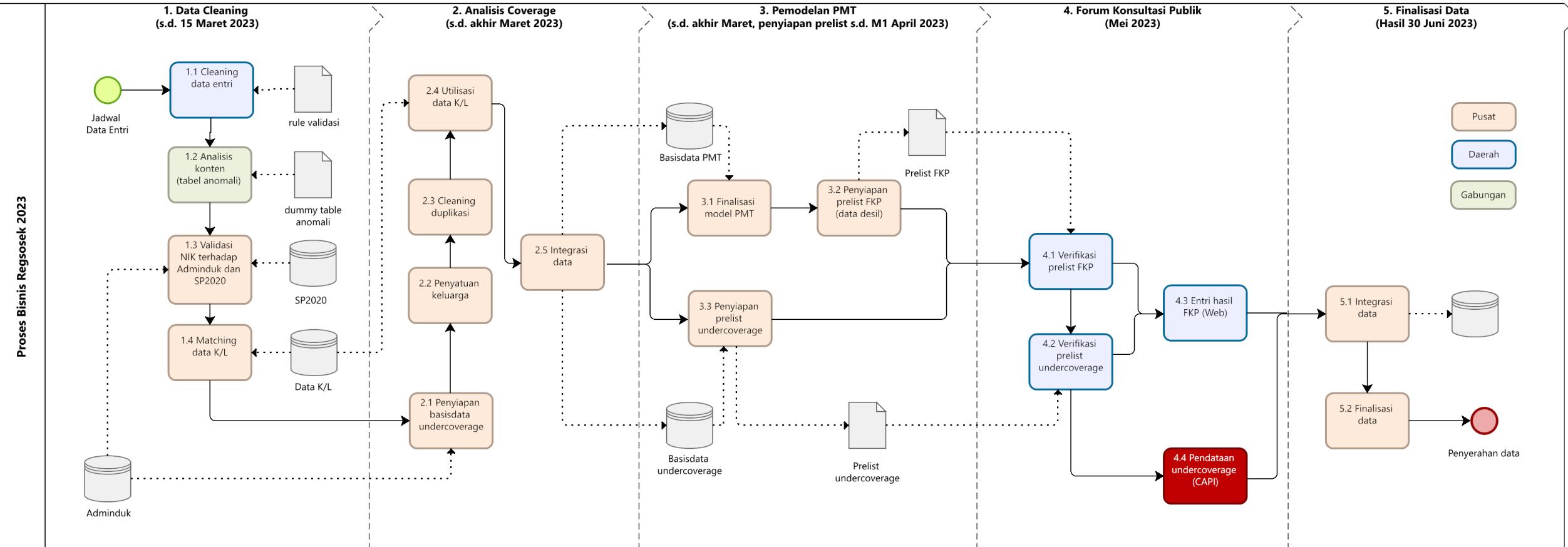
87,70%

dari jumlah keluarga versi adminduk
88,929,048



PROSES BISNIS REGSOSEK

TAHUN PELAKSANAAN 2023





BADAN PUSAT STATISTIK

ST2023
SENSUS PERTANIAN



Terima Kasih
www.bps.go.id

